

# ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DANA LINGKUNGAN UNTUK PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS: SUMATERA SELATAN, KEPULAUAN RIAU, DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)

## Comparative Analysis of the Performance of Environmental Funds For Forest Fire Management (Case Study: South Sumatra, Riau Islands, and Bangka Belitung Islands)

Rini Astuti Hijrah J. Tudon<sup>1)</sup>,  
Universitas Fajar  
[riniastuti150302@gmail.com](mailto:riniastuti150302@gmail.com)

Habib Muhammad Shahib<sup>2)</sup>,  
Universitas Fajar  
[muh.shahib@unifa.ac.id](mailto:muh.shahib@unifa.ac.id)

Siprianus Palete<sup>3)</sup>  
Universitas Fajar  
[sipripalete@gmail.com](mailto:sipripalete@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja dana lingkungan untuk penanggulangan kebakaran hutan (studi kasus: Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berbasis dokumen. Data penelitian ini adalah Laporan SDGs dan LPPD dari Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami kebakaran hutan dalam rentang tahun 2017 sampai dengan 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga Provinsi yang memiliki kinerja paling baik dalam menangani karhutla serta merealisasikan anggaran adalah Kepulauan Riau, kemudian disusul oleh Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Akhirnya, penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan terkait dengan dana lingkungan dalam aspek tata kelola dan keberlanjutan.

**Kata Kunci:** Dana Lingkungan; Efektivitas; Efisiensi; Karhutla; Kinerja

### ABSTRACT

*This study aims to determine the comparison of environmental fund performance for forest fire management (case study: South Sumatra, Riau Islands, and Bangka Belitung Islands). This research uses a qualitative method with a document-based descriptive approach. The data of this study are SDGs and LPPD reports from the Provinces of South Sumatra, Riau Islands, and Bangka Belitung Islands which experienced forest fires in the range of 2017 to 2021. The results of this study show that the three Provinces that have the best performance in handling forest and land fires and realizing the budget are Riau Islands Province, followed by South Sumatra and Bangka Belitung Islands. Finally, this study contributes to increasing knowledge about financial management and reporting related to environmental funds in the aspects of governance and sustainability.*

**Keywords:** Effectiveness; Efficiency; Environmental Funds; Karhutla; Performance

## 1. PENDAHULUAN

Bencana kebakaran hutan sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan berbagai faktor seperti kondisi cuaca ekstrim, perubahan iklim, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, dan aktivitas manusia seperti pembakaran lahan. Tidak hanya itu, Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) mempunyai dampak buruk tidak hanya lingkungan, namun juga perekonomian, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang sering terjadi berbagai di Indonesia (Panjaitan, 2023). Penyebab utama kebakaran adalah faktor alam, seperti suhu panas saat musim kemarau dan faktor manusia antara lain, pembakalan liar serta industri perkebunan dan sawit (Amri, 2019). Fenomena ini bertentangan dengan seruan Presiden Joko Widodo untuk mengubah perekonomian Indonesia dari *conventional economic approach* menuju *green economy approach*. Studi menunjukkan bahwa frekuensi kebakaran hutan semakin meningkat dan dampaknya negatifnya sangat tinggi, sehingga memerlukan tindakan serius untuk menyelesaikan masalah ini guna menjamin *environmental and economic sustainability*.

Menurut Pador (2021), dana lingkungan dalam penanggulangan kebakaran hutan sangatlah penting, karena kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pengelolaan kebakaran hutan yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk dana lingkungan agar pencegahan dan pengendalian kebakaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan efektif. Menurut data, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masih memerlukan perbaikan dan sering kali bersifat acak dan struktural seperti pemerintah mencatat adanya penurunan angka kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 akan tetapi, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya menangani kebakaran hutan dengan berbagai program dan kebijakan.

Menarik kemudian untuk melihat kajian akuntansi yang berfokus dalam mengkaji isu lingkungan dan tata kelola pemerintah. Misalnya, Adams et al. (2014) menunjukkan peran *New Public Management* (NPM), tolak ukur, dan *Balanced Scorecards* (BSCs) dalam sektor publik pemerintah terkait penggunaan ukuran kinerja yang tidak hanya untuk pelaporan internal, tetapi juga untuk pelaporan eksternal kepada berbagai pemangku kepentingan termasuk media, masyarakat, dan lembaga pendanaan eksternal. Namun, Adams membahas kembali bahwa rendahnya penggunaan data sosial dan lingkungan meskipun ada pedoman sukarela seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), terutama di lingkungan non-kompetitif seperti pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah dapat secara efektif mendorong sektor publik untuk lebih bertanggungjawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Menurut Shahib (2021) mengacu pada asumsi pertama NPM bahwa pemerintah harus menyesuaikan lingkungan bisnis dan tujuan strategisnya dengan pembiasaan pasar, kondisi ini juga dapat dilihat pada sektor publik pemerintah daerah di Indonesia. Dilihat dari praktik akuntabilitas kinerja pemerintah daerah cenderung menempatkan parameter makro dalam laporan akuntabilitas hanya berdasarkan ukuran efisien-efektif dan moneter. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih melihat kepada pengelolaan secara keseluruhan. Jadi, masih sangat kurang yang berfokus pada isu-isu yang spesifik seperti pengelolaan dana lingkungan hidup dan pengukurannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menyelami penelitian mengenai bagaimana perbandingan kinerja dana lingkungan untuk penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, dan Bangka Belitung.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, alokasi sumber daya, dan akuntabilitas publik melalui analisis rasio, laporan keuangan, dan evaluasi sistematis, sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menghasilkan pendapatan (Sumual et al., 2017). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk BPD LH untuk mengelola dana sektor lingkungan dengan transparansi dan akuntabilitas (Vania, 2021). Dengan tujuan mengurangi emisi gas, mendukung proyek lingkungan, dan ekonomi ramah lingkungan (BPD LH, 2020). Untuk itu, diperlukan penerapan NPM dalam tata kelola yang memberikan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja, *productivity*, dan *public service quality*. Dan dampak negatifnya yaitu terabaikannya standar kualitas hidup yang lain, seperti modal sosial, kualitas hidup, kesetaraan, partisipasi, dampak sosial, dan praktek-praktek kemasyarakatan. Sehingga, semua hal tersebut cenderung tidak mendapatkan tempat yang penting dalam praktik akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia (Shahib, 2021).

### **Kebakaran Hutan Di Indonesia**

Hutan adalah suatu kawasan yang ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan seperti ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penyerap karbon, habitat hewan, pengatur aliran hidrologi, dan konversi tanah serta merupakan salah satu aspek terpenting dari biosfer bumi (Tuhulele, 2014).

Kebakaran secara umum merupakan peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur, yaitu pembakaran bahan bakar, oksigen atmosfer, dan sumber energi atau panas. Sehingga mengakibatkan kerugian seperti harta benda, cedera, dan juga menyebabkan kematian (National Fire Protection Association, 2023).

Indonesia menduduki peringkat ketiga yang memiliki hutan tropis terluas di dunia dan pastinya di seluruh wilayah Asia. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai potensi sumber daya hutan yang sangat besar. Pada masa orde baru, khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto sumber daya alam termasuk sektor kehutanan banyak dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Seperti kayu lapis merupakan barang ekspor terpenting yang berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar negara. Kebijakan pemerintah pada saat itu mendorong ekspor kayu olahan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan sektor tersebut (Tuhulele, 2014).

Menurut *Global Forest Watch* (GFW) dan *World Resources Institute* (WRI) (2023). Pada tahun 2001, Indonesia memiliki 136 Mha hutan asli (primer) yang mencakup lebih dari 83% luas daratannya. Pada tahun 2023, Indonesia kehilangan 1,03 juta hektar hutan primer yang setara dengan 842 juta ton emisi CO<sub>2</sub>. Ditemukan 144 Kha berada di dalam kelas tutupan lahan resmi Indonesia dengan ukuran bidang lebih dari 2 hektar.

Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya membawa dampak ekologis, tetapi juga menimbulkan implikasi finansial yang signifikan dalam konteks akuntabilitas pemerintah. Di mana banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sosial-lingkungan yang mempertanyakan dan memprotes praktik akuntabilitas sosial-lingkungan di pemerintah daerah. Dan diyakini bahwa akuntabilitas pemerintah daerah saat ini cenderung didominasi oleh pandangan dan praktik yang berfokus pada capaian moneter atau hanya berfokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, tanpa memerhatikan hal hal non moneter seperti masalah lingkungan, sosial, dan budaya. Meskipun, banyak dampak sosial-lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat. Tetapi, terdapat pergerakan besar dari LSM-LSM sosial-lingkungan yang mengkritisi kegiatan akuntabilitas. Dan tujuan pembangunan keberlanjutan telah menjadi dasar utama kegiatan pemerintah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang (Shahib, 2021).

Terbukti beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami kehilangan hutan asli yang signifikan. Deforestasi disebabkan karena beberapa faktor, termasuk penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kebakaran hutan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial melalui studi pustaka dan media (portal berita, website resmi pemerintah, dan media sosial). Penelitian ini dilaksanakan 08 Juli 2024 dan dilakukan dengan cara mendownload data dari laporan SDGs (*Sustainable Development Goals*) Provinsi Sumatera Selatan, Riau, dan Bangka Belitung dan laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Kemudian peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk laporan SDGs, website resmi pemerintah, dan menggunakan pengukuran efektivitas dan efisiensi. Adapun Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data yaitu (1) Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. (2) Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks dalam sistematis sehingga jadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. (3) Menentukan efisien dan efektivitas kinerja dana lingkungan untuk kebakaran hutan dapat diukur melalui metode akuntansi dan analisis data, termasuk pengukuran berbasis anggaran dan realisasi. Dan (4) Penarikan kesimpulan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diartikan sebagai suatu sistem perspektif atau metode observasi yang bertujuan untuk menjelaskan dan menyajikan keadaan yang terjadi selama penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja dana lingkungan hidup sebagai salah satu sumber penyaluran dana. Dalam penelitian ini keakuratan data diverifikasi dengan menggunakan teknik triangulasi, karena penelitian ini berusaha membandingkan data dari tahun ke tahun pada ketiga Provinsi tersebut untuk menemukan kebenaran dan keterangan yang tepat terhadap data yang didapat. Untuk menilai dari efektivitas dan efisien kinerja dana lingkungan dalam penanggulangan kebakaran hutan.

**Tabel 4.1 Data Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021**

Tahun	Anggaran (a)	Realisasi (b)	Luas Kebakaran Tahun Sebelumnya (c)	Luas Kebakaran Tahun Ini (d)	Efisiensi (%) (b/a x 100%)	Efektivitas (%) (d-c/d) x 100%
2017	750,000,000	747,942,600	8,784.91	3,625.66	99.73	-142
2018	4,780,050,000	4,767,422,400	3,625.66	16,266.60	99.74	-77
2019	270,000,000	250,956,098	16,266.60	336,798.00	92.95	95
2020	12,100,000,000	11,676,500,000	336,798.00	950.00	96.50	-35,352
2021	4,344,401,000	4,133,804,111	950.00	5,245.00	95.15	81

Sumber: Data diolah (2024)

**Tabel 4.2 Data Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021**

Tahun	Anggaran (a)	Realisasi (b)	Luas Kebakaran Tahun Sebelumnya (c)	Luas Kebakaran Tahun Ini (d)	Efisiensi (%) (b/a x 100%)	Efektivitas (%) (d-c/d) x 100%
2017	144,832,675	144,560,525	67.36	19.61	99.81	-243
2018	9,630,379,800	8,164,911,105	19.61	320.96	84.78	93
2019	1,160,809,000	290,202,250	320.96	6,134.00	25.00	94
2020	352,500,000	352,069,000	6,134.00	8,805.00	99.88	30
2021	170,000,000	169,973,000	8,805.00	1,588.00	99.88	-454

Tahun	Anggaran (a)	Realisasi (b)	Luas Kebakaran Tahun Sebelumnya (c)	Luas Kebakaran Tahun Ini (d)	Efisiensi (%) (b/a x 100%)	Efektivitas (%) (d-c/d) x 100%
2017	1,490,775,500	1,230,955,547	0	0	82.57	0
2018	8,719,278,716	6,192,537,658	0	2,055.67	57.98	1
2019	11,348,405,146	8,013,027,820.98	2,055.67	4,788.00	70.61	57
2020	7,653,059,998	7,016,394,214	4,788.00	576	91.68	-731
2021	6,557,951,585	4,902,931,814	576	385	74.76	-49

Sumber: Data diolah (2024)

**Tabel 4.3 Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021**

Sumber: Data diolah (2024)

Dari tabel 4.1 menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara anggaran, efektivitas, dan efisiensi dalam menanggulangi

kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun. Anggaran yang lebih besar tidak menjamin selalu berhasil dalam menanggulangi kebakaran hutan,

hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa luas kebakaran tidak selalu berkurang seiring dengan bertambahnya anggaran (Fahrianta & Carolina, 2012).

Dari tabel 4.2 menunjukkan meskipun ada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan menurunkan efisien serta mengalokasikan anggaran namun, penanggulangan kebakaran hutan belum selaras/konsisten. Menurut Fahlevi & Anantao (2015) menjelaskan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas sangat bervariasi antara satu tahun dengan tahun lainnya.

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa dengan bertambahnya anggaran tidak selalu selaras dengan efektivitas dan juga efisien dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Meskipun telah dilakukan upaya dengan cara meningkatkan anggaran, namun hasil penanggulangan kebakaran hutan masih menunjukkan perbedaan yang signifikan. Menurut Novita (2016) menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan anggaran cukup efisien, namun masih perlu ditingkatkan agar pengalokasian anggaran lebih optimal.

## Pembahasan

### Perbandingan Kinerja Dana Lingkungan Di Tiga Provinsi

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Provinsi yang memiliki kinerja paling efektif dan efisien adalah sebagai berikut: Sumatera Selatan memiliki nilai efektif yang paling tinggi pada tahun 2019 dan tahun 2021. Sementara itu, Provinsi tersebut mendapat nilai efisien paling tinggi pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 dan 2021 tersebut berhasil namun, anggaran yang direalisasikan belum digunakan dengan efisien. Di Provinsi Riau memiliki nilai efektif yang paling tinggi pada tahun 2018 s.d 2019. Kemudian, memiliki nilai efisien paling tinggi pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa berhasil menangani kebakaran hutan dan lahan, serta berhasil merealisasikan anggaran dengan efisien. Adapun Provinsi Bangka Belitung memiliki nilai efektif paling tinggi pada

tahun 2019 dan memiliki nilai efisien paling tinggi pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa pada tahun

2019 menangani kebakaran hutan dengan baik namun tidak dengan anggaran yang diberikan. Disamping itu, di tahun 2018 merealisasikan anggaran dengan baik tapi tidak dengan menangani kebakaran hutan. Dari analisis di atas, penyebab terjadinya nilai efektivitas dan efisiensi yang tinggi dari ketiga Provinsi tersebut ialah karena penanggulangan atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang baik. Kemudian, Provinsi Kepulauan Riau merupakan paling baik dalam mengalokasikan anggaran. Walaupun terdapat dua Provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang kurang baik dalam mengalokasikan anggarannya. Dalam hal ini disebabkan karena lemahnya koordinasi di antara *Stakeholder* pada saat merencanakan program atau kegiatan sehingga anggaran yang dialokasikan tidak optimal (SDGs, 2019).

### **Kebakaran Hutan Terus Berlanjut Meski Dana Telah Disalurkan**

Berdasarkan temuan penelitian bisa dilihat ketidakkonsistenan penggunaan dana dari tahun ke tahun pada ketiga Provinsi tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam penerapan program, pengelolaan dana, atau penggunaan strategi yang tidak efektif dalam mengatasi penyebab kebakaran hutan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengidentifikasi serta mengatasi kelemahan pendekatan yang ada saat ini, dengan mengusulkan solusi yang lebih efisien untuk meningkatkan tata kelola dalam mengatasi kebakaran hutan.

### **Bagaimana Seharusnya management Kebakaran Hutan?**

Menurut Yusuf et.al (2019) menjelaskan efektivitas kebijakan masih banyak celah dan sangat rendah. Dikarenakan, selama ini kebijakan yang diterapkan masih bersifat sektoral dan lemah atau lemah dalam hal koordinasi antara lembaga dan departemen di pusat dan daerah. Pendekatan kebijakan yang digunakan nampaknya masih lebih banyak pada upaya memadamkan daripada pencegahan karhutla. Ini menunjukkan bahwa meskipun semua sarana infrastruktur tata kelola lingkungan mulai dari anggaran dan prasarana kebakaran itu ada namun, sering kali masih kurang efektif karena itu diperlukan peran serta masyarakat untuk aktif mengawasi aktivitas yang bisa merusak lingkungan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berikut kesimpulan atas hasil penelitian ini. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis data yaitu sebagai berikut: Provinsi yang memiliki efektivitas yang tinggi ada pada Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 95% dan 81% pada tahun 2019 dan 2021. Kemudian disusul oleh Kepulauan Riau yang memiliki nilai efektivitas 93% dan 94% pada tahun 2018 s.d 2019. Terakhir, ada Provinsi Bangka Belitung yang memiliki nilai efektivitas terendah dari kedua Provinsi tersebut. Dari ketiga Provinsi yang memiliki efisiensi yang tinggi terdapat pada Kepulauan Riau dengan nilai 25.00% pada tahun 2019. Kemudian di posisi kedua ada Provinsi Bangka Belitung dengan nilai 57.98% pada tahun 2018. Dan di posisi terakhir ada Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 92.95% pada tahun 2019. Adapun Provinsi yang memiliki kinerja paling baik dalam menangani kebakaran hutan dan lahan serta merealisasikan anggaran dengan baik adalah Provinsi Kepulauan Riau, kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Pertama, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebaiknya diperbaiki agar lebih efektif dan efisien dalam menunjukkan penggunaan anggaran. Selanjutnya, bagi praktisi, penting untuk mendorong pengawasan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan) agar mereka dapat mengacu pada data dampak nyata dalam menilai efektivitas penyaluran dana. Terakhir, untuk masyarakat, diharapkan adanya upaya untuk mengedukasi mereka dalam membaca laporan Keuangan dan akuntabilitas Pemda, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih transparan dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. A., Muir, S., & Hoque, Z. (2014). Measurement of Sustainability Performance in the Public Sector. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Kebijakan Keberlanjutan*, 5, 46–67. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2012-0018>
- Amri, R. (2019). Analisis Prosedur Tetap Dalam Penganggulangan Bencana Daerah (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan) Di Kabupaten Rokan Hilir.
- Atmaja, D. S. (2019). A Study on Environmental Redemption (Searching for Theological Islamic Perspectives on Forest Fire at Kubu Raya Regency).
- Bangsawan, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 Di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. <https://repository.uir.ac.id/11845/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/11845/1/187121031.pdf>
- BPDLH. (2020). The Indonesian Environment Fund (BPDLH). <https://web.bpdh.id/about-bpdh/>
- Butler, R. A. (2020). Berapa Banyak Hutan Dunia yang Telah Menghilang dalam Satu Dekade ini? <https://www.mongabay.co.id/2020/06/13/berapabanyak-hutan-dunia-yang-telah-menghilang-dalam-satu-dekade-ini/>
- Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Indikasi Luas Kebakaran. <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>
- Hairi, D. (2021). Pergeseran Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, Dari Pemadaman Kepada Pencegahan. *Pergeseran Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, Dari Pemadaman Kepada Pencegahan*, 1–20.
- National Disaster Management Authority. (2020). *Forest Fire Management Global Best Practices*. July, 32.
- Panjaitan, B. D. (2023). Menuju Ekonomi Hijau: Skema Pembiayaan Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. 7(1), 302–311. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4170/http>
- Shahib, H. M. (2021). Towards the Local Government's Integrated Accountability Framework A Critical Lesson From Socio-Environmental Issues in Indonesia. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-33-6617-6>

Tuhulele, P. (2014). Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i2.1973>

Vania, H. F. (2021). BPD LH dan Masa Depan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. [https://katadata.co.id/infografik/606317e66c42b/bpdlh-dan-masadepan-pengelolaan-dana-lingkungan-hidup#:~:text=BPDLH bertujuan untuk menjadi pusat pembiayaan %28financial hub%29,kelautan dan perikanan dan bidang lain terkait lingkungan](https://katadata.co.id/infografik/606317e66c42b/bpdlh-dan-masadepan-pengelolaan-dana-lingkungan-hidup#:~:text=BPDLH%20bertujuan%20untuk%20menjadi%20pusat%20pembiayaan%20financial%20hub%29,kelautan%20dan%20perikanan%20dan%20bidang%20lain%20terkait%20lingkungan).

Watch, G. F. (2023). Indonesia Deforestation Rates & Statistics. Globalforestwatch.Org. <https://www.globalforestwatch.org/>

Yusuf, A., Hapsoh, H., Siregar, S. H., & Nurrochmat, D. R. (2019). Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2), 67. <https://doi.org/10.31258/dli.6.2.p.67-84>